

Notulen
Pertemuan Pengurus Korpri
Unit Kementerian PPN/Bappenas
Dengan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

- **Hari** : **Rabu**
- **Tanggal** : **5 Maret 2003**
- **Waktu** : **14.50 – 15.50**
- **Tempat** : **Ruang tamu Menteri**

Pertemuan dimulai pada pukul 14.50 dan dihadiri oleh seluruh pengurus kecuali Wakil Ketua II (Sdr. Salusra Widya sedang bertugas ke Surabaya) dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie (tanpa didampingi pejabat lain).

Ketua Korpri, mewakili pengurus, memperkenalkan masing-masing pengurus Korpri dan menyampaikan kepada Menteri bahwa kepengurusan ini merupakan hasil dari proses yang demokratis sesuai dengan paradigma baru Korpri. Ketua Korpri juga melaporkan program kerja Korpri serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak pengukuhan kepengurusan tanggal 7 Januari 2003 termasuk hasil dialog dengan pegawai golongan I dan II.

Wakil Ketua I, atas nama pengurus, mengucapkan terima kasih atas disediakannya ruangan untuk Sekretariat Korpri.

Ketua Korpri menyampaikan 3 (tiga) hal yang menjadi concern para pegawai (anggota Korpri) Bappenas yaitu masalah perumahan, masalah tunjangan kerja ganda, dan masalah eksistensi Bappenas sebagai lembaga perencana.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Kesejahteraan pegawai dan tunjangan kerja ganda**
Kondisi bangsa kita saat ini sangat sulit dan semakin sulit karena hal tersebut dibuat sendiri oleh bangsa kita. Sehingga yang terjadi kemudian antara lain utang luar negeri yang terus bertambah. Selain itu gaji pegawai sangat rendah yang bahkan untuk hidup biasa saja tidak cukup. Akibatnya muncul KKN. Ketidakadilan memang luar biasa. Urusan ini adalah urusan dasar yang menyangkut manusia. Urusan-urusan pembangunan infrastruktur dan ekonomi lainnya adalah masalah teknis. Yang paling mendasar adalah manusianya.
Korpri diharapkan juga ikut memikirkan bagaimana caranya menaikkan gaji. Upaya rasionalisasi pegawai negeri membutuhkan dana yang jumlahnya sangat besar karena hal itu menuntut adanya PHK yang memerlukan pemberian pesangon yang tinggi. Di negara lain telah ada program re-education untuk mempersiapkan pegawai yang akan di-PHK sebagai bagian dari program rasionalisasi. Dalam hal ini kita ketinggalan. Saat ini Bapak Djunaedi sedang mendekati UNDP untuk dapat memberikan bantuan dalam rangka program rasionalisasi pegawai. Konsultan di bidang ini sangat mahal. Kita

tidak punya tradisi perampingan organisasi jadi kita tidak punya konsultan yang mampu di bidang ini. Menteri telah berusaha meminta negara-negara donor untuk turut membantu upaya rasionalisasi pegawai sebagai bagian pembangunan manusia. Namun mereka umumnya menolak karena menangani bidang ini dapat dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

2. Eksistensi Bappenas

Eksistensi Bappenas sangat kuat. Dalam sisa waktu jabatannya Menteri akan memberikan pengertian terhadap legislatif untuk memberikan perhatian pada pembangunan manusia. Bappenas harus memikirkan hal-hal seperti ini. Kita memerlukan perencanaan yang matang sehingga bangsa ini tidak semakin terpuruk, memperbanyak utang dan tergantung pada lembaga asing. Sebagai contoh Pemerintah menghapus subsidi BBM dan menjual saham Indosat untuk mendapatkan Rp 18 triliun dan Rp 5,4 triliun dengan risiko seperti ini. Padahal di sisi lain Pemerintah memberikan subsidi Rp 91 triliun kepada perbankan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah lebih tunduk kepada lembaga asing. Kita seharusnya tidak lagi bertindak hanya berdasarkan untung rugi saja. Ada faktor lain yang juga harus diperhatikan.

Karena Bapenas bukan lembaga pengambil keputusan jadi Bappenas bisa berfikir. Ibarat organ tubuh, Bappenas bagaikan otak yang khusus berfikir. Departemen lain bukannya tidak berfikir namun mereka sangat fokus pada bidangnya. Adalah tugas Bappenas untuk mengaitkan dan memadukan program departemen-departemen.

Struktur organisasi juga harus disesuaikan. Menteri berbeda pendapat dengan Kantor MenPAN yang membuat struktur organisasi yang uniform. Hal ini juga pernah dikritik Meneg Koperasi dan UKM yang mengatakan bahwa MenPAN membuat baju dengan ukuran yang sama untuk orang-orang yang besarnya berbeda-beda.

Menteri menyambut baik bila ada gagasan-gagasan lepas yang disampaikan langsung kepada Menteri karena Menteri tidak terlampau terpaku atau rigid pada aturan. Kehidupan seperti ini sudah harus dikembangkan apalagi dalam sebuah lembaga pemikir atau scholar institutions.

3. Program-Program Korpri

Inti tiap-tiap departemen adalah pegawai tetapnya. Dengan demikian keberadaan Korpri menjadi sangat penting.

Program Kerja Korpri pada dasarnya sudah bagus. Boleh dikatakan, seperti yang diketahui Menteri dari negara-negara lain, Indonesia unik. Uniknya disamping kita berusaha mengoreksi Orde Baru kita tetap mengambil kebaikan dari Orde Baru. Korpri adalah salah satu kebaikan itu. Korpri adalah perwujudan gotong royong dalam suatu organisasi. Problematikanya adalah bagaimana (program-program) ini benar-benar bisa terwujud seperti urusan asuransi dan rumah. Padahal ini adalah hal yang basic.

Jakarta, 5 Maret 2003

Notulis